

## Menata APBD, Membangun Daerah: Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur Pada Kabupaten Tanah Laut

**Penulis:**

Rizky Aldi Setianda<sup>1</sup>  
Try Edi Suwarno<sup>2</sup>  
M. Riduan Abdillah<sup>3</sup>  
Yasir Hadiani<sup>4</sup>  
Victorinus Laoli<sup>5</sup>  
Faisal Fadly Pulungan<sup>6</sup>  
Riyadatul Muthmainah<sup>7</sup>  
Ananda Sabrida Tora  
Boru Sinaga<sup>8</sup>

**Afiliasi:**

Politeknik Negeri  
Tanah Laut<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>

**Korespondensi:**

rizky.aldi@politala.ac.id

**Histori Naskah:**

Submit: 23-06-2025  
Accepted: 11-07-2025  
Published: 15-08-2025

**Abstrak:** Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana daerah mampu membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan studi kasus pada Kabupaten Tanah Laut selama periode 2015–2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda, penelitian ini mengevaluasi kontribusi dua variabel strategis terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik efisiensi anggaran maupun investasi infrastruktur memiliki hubungan negatif terhadap kemandirian keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran dan investasi perlu diarahkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam konteks teori kapasitas fiskal daerah, kondisi ini mencerminkan kebijakan fiskal daerah perlu diperkuat untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, diperlukan formulasi strategi fiskal yang tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga efektivitas serta keberlanjutan manfaat ekonomi jangka panjang dari belanja daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan fiskal daerah

**Kata kunci:** Efisiensi Anggaran, Investasi Infrastruktur, Kemandirian Fiskal

---

### Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan tonggak penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan mandat luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara otonom—mencakup perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pembangunan daerah. Harapannya, desentralisasi fiskal akan menciptakan kemandirian keuangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya merefleksikan idealisme tersebut. Banyak daerah masih terjebak dalam pola ketergantungan fiskal, di mana kemampuan menggali pendapatan asli daerah (PAD) berjalan lambat, sementara efektivitas belanja publik pun belum sepenuhnya optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam realisasi PAD selama kurun waktu satu dekade terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga 2024.

**Tabel 1.**

**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut (2015–2024)**

| Tahun | PAD (M) |
|-------|---------|
| 2015  | 152.14  |
| 2016  | 148.68  |
| 2017  | 187.17  |
| 2018  | 128.45  |
| 2019  | 169.79  |
| 2020  | 189.6   |
| 2021  | 206.14  |
| 2022  | 193.89  |
| 2023  | 211.72  |
| 2024  | 236.92  |

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2024

Berdasarkan data dari DJPK Kementerian Keuangan (2024), PAD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp152,14 miliar. Nilai ini mengalami sedikit penurunan pada tahun berikutnya menjadi Rp148,68 miliar. Namun, pada tahun 2017 PAD meningkat signifikan menjadi Rp187,17 miliar. Ironisnya, tren positif ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2018 PAD justru turun drastis menjadi Rp128,45 miliar, yang merupakan angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Mulai tahun 2019 hingga 2024, PAD menunjukkan tren yang lebih stabil dan cenderung meningkat. Tahun 2019 mencatat PAD sebesar Rp169,79 miliar, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp189,6 miliar, dan terus naik menjadi Rp206,14 miliar pada tahun 2021. Meskipun pada tahun 2022 sempat turun menjadi Rp193,89 miliar, PAD kembali naik menjadi Rp211,72 miliar pada 2023 dan mencapai titik tertinggi sebesar Rp236,92 miliar pada tahun 2024.

Fluktuasi PAD ini mencerminkan adanya dinamika dalam kemampuan daerah untuk menggali potensi pendapatan lokal. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks efektivitas kebijakan fiskal daerah, optimalisasi sektor unggulan, serta dampak eksternal seperti pandemi dan perubahan regulasi nasional terhadap performa PAD. Dengan memahami pola dan faktor yang mempengaruhi PAD, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Teori Kapasitas Fiskal Daerah (*Fiscal Capacity Theory*) menegaskan bahwa kemandirian fiskal suatu daerah bergantung pada kapasitas menghasilkan pendapatan lokal serta efisiensi dalam pengeluaran publik. Rendahnya rasio PAD tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi kapasitas fiskal Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan strategis dalam pengelolaan APBD, khususnya efisiensi belanja publik. Sugiarto dan Mulyani (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas fiskal yang rendah bukan hanya karena keterbatasan sumber daya lokal, tetapi juga lemahnya inovasi kebijakan fiskal daerah.

Selanjutnya, aspek efisiensi anggaran juga menunjukkan gejala masalah yang perlu mendapat perhatian. Belanja daerah yang didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal menghambat kemampuan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Padahal, belanja modal khususnya investasi infrastruktur diyakini sebagai salah satu cara meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi lokal. Studi yang dilakukan oleh Noviyanti dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa efisiensi

anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan belanja dan orientasi pembangunan jangka panjang. Tanpa hal ini, APBD cenderung hanya bersifat administratif, bukan strategis.

Fakta lain menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten Tanah Laut cenderung stagnan atau mengalami peningkatan yang kurang signifikan dibandingkan dengan belanja operasional. Hal ini memperkuat asumsi bahwa manajemen anggaran di Kabupaten Tanah Laut belum optimal dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui investasi produktif yang nyata.

Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur publik yang rendah dapat berakibat pada stagnasi pembangunan ekonomi lokal. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya merupakan elemen vital dalam menarik investasi swasta sekaligus mendorong peningkatan PAD dalam jangka panjang. Namun demikian, kebijakan investasi tersebut belum menjadi prioritas utama dalam APBD Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan kajian oleh Arifin & Koesrindartoto (2021), pembangunan infrastruktur yang diarahkan secara strategis mampu meningkatkan PAD melalui efek berganda terhadap perekonomian lokal, seperti peningkatan aktivitas perdagangan dan pertumbuhan UMKM. Penelitian oleh Hidayat & Wulandari (2023) menekankan bahwa investasi infrastruktur publik yang stagnan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan memperluas basis pajak lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD masih membutuhkan perbaikan terutama dalam hal efisiensi anggaran serta peningkatan investasi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang menjadi tujuan utama kemandirian fiskal dapat tercapai.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi pengelolaan APBD yang tepat, berbasis kinerja, serta diarahkan pada optimalisasi investasi infrastruktur dan efisiensi anggaran agar Kabupaten Tanah Laut mampu mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal secara mandiri. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah efisiensi anggaran dan investasi anggaran berpengaruh terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran dan investasi anggaran terhadap tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut.

## Studi Literatur

Teori Kapasitas Fiskal Daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sendiri serta menerapkan efisiensi dalam belanja daerah. Bird dan Smart (2002) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah terdiri dari *revenue capacity*, *spending efficiency*, dan *fiscal effort*. Kapasitas fiskal yang kuat dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan menciptakan otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangan publik (Bird & Smart, 2002).

Efisiensi anggaran merupakan ukuran efektivitas pengelolaan belanja publik yang memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan sumber daya yang minimal. Efisiensi ini menjadi penting agar belanja publik tidak mengalami pemborosan dan dapat diarahkan kepada kebutuhan prioritas masyarakat (Mardiasmo, 2009). Hipotesis terkait efisiensi anggaran dalam penelitian ini adalah:

H1: Efisiensi anggaran berpengaruh terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut

Investasi infrastruktur merupakan belanja modal pemerintah yang diarahkan pada pembangunan fasilitas publik seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan jaringan utilitas publik lainnya. Infrastruktur yang memadai diyakini mampu meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah (Aschauer, 1989). Hipotesis terkait investasi infrastruktur dalam penelitian ini adalah:

H2: Investasi infrastruktur berpengaruh terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur terhadap kemandirian fiskal daerah. Fokus kajian ini terletak pada Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan cakupan data selama sepuluh tahun, yakni dari tahun 2015 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya data yang berkaitan dengan APBD dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam struktur dan realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut. Adapun unit analisisnya adalah data tahunan yang mencerminkan perhitungan rasio keuangan sebagai indikator dari masing-masing variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal daerah, yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi belanja daerah. Variabel independen terdiri dari dua: efisiensi keuangan, yang dihitung melalui rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah, dan investasi infrastruktur, yang diukur melalui rasio belanja modal terhadap total anggaran belanja daerah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji sejauh mana efisiensi keuangan dan investasi infrastruktur memengaruhi tingkat kemandirian fiskal. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk memperoleh nilai koefisien regresi, signifikansi pengaruh, dan kesesuaian model. Penggunaan regresi linier ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan linier antara variabel independen dan dependen, serta menilai arah dan kekuatan pengaruh masing-masing faktor terhadap kemandirian fiskal daerah. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun implikasi kebijakan terkait pengelolaan APBD yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut selama periode 2015–2024. Hasil regresi berganda sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan, meskipun dengan tingkat signifikansi yang berbeda.

**Tabel 2.**

**Hasil Penelitian**

| Variabel Independen          | Koefisien Regresi (B) | Sig. (p-value) |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Konstanta                    | 0,186                 | 0,004          |
| Efisiensi Anggaran(EA)       | -0,001                | 0,090          |
| Investasi Infrastruktur (II) | -0,001                | 0,044          |

Data diolah (2025)

Dependen variabel: Kemandirian Keuangan (KK) Tingkat signifikansi: 10% (two-tailed)

Tabel ini menunjukkan nilai koefisien yang merepresentasikan arah dan kekuatan hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai-nilai tersebut mengilustrasikan bagaimana kebijakan pengelolaan anggaran serta alokasi dana pada infrastruktur dapat berperan dalam membentuk tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dengan melihat besarnya kontribusi masing-masing variabel, tabel ini menjadi dasar untuk mengevaluasi strategi pembangunan keuangan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

**Pembahasan**

**Pengaruh Efisiensi Anggaran terhadap Kemandirian Keuangan (H1)**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Anggaran (EA) memiliki koefisien regresi sebesar -0,001 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,090. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah justru diikuti oleh penurunan tingkat kemandirian fiskal. Secara statistik, pengaruh ini signifikan secara marginal pada tingkat signifikansi 10% (two-tailed), meskipun belum signifikan pada tingkat konvensional 5%.

Secara teoritis, hasil ini menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran tidak selalu identik dengan peningkatan kapasitas fiskal. Menurut teori kapasitas fiskal daerah, efisiensi seharusnya mendukung kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Bird & Smart, 2002). Namun, dalam konteks ini, efisiensi tampaknya lebih diarahkan pada pemangkasan belanja tanpa diikuti upaya peningkatan penerimaan, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa efisiensi yang dilakukan bersifat *cost-cutting* semata, bukan *value-creating*.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Andriyani (2021), yang menyatakan bahwa efisiensi fiskal tidak secara otomatis meningkatkan PAD, terutama ketika strategi efisiensi tidak disertai dengan reformasi pendapatan. Sejalan dengan itu, Rahmawati (2020) menemukan bahwa efisiensi sering kali justru mengurangi belanja yang bersifat produktif, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi minimal.

Variabel Investasi Infrastruktur (II) memiliki koefisien regresi sebesar -0,001 dengan nilai p-value = 0,044. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur berkorelasi negatif dengan tingkat

kemandirian keuangan daerah. Karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik baik pada tingkat signifikansi 5% maupun 10%.

Hasil ini menunjukkan adanya kontradiksi dengan asumsi dasar teori kapasitas fiskal yang menempatkan investasi infrastruktur sebagai instrumen penting dalam memperkuat basis ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan PAD. Dalam idealnya, pembangunan infrastruktur publik akan menciptakan multiplier effect yang mendorong aktivitas ekonomi lokal, yang pada gilirannya memperluas basis penerimaan fiskal daerah (Musgrave & Musgrave, 1989). Namun, dalam konteks Kabupaten Tanah Laut, hasil negatif ini dapat mencerminkan bahwa belanja infrastruktur belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif atau belum memberikan efek ekonomi yang nyata dalam jangka pendek.

Temuan ini sejalan dengan Putri dan Widodo (2022), yang menemukan bahwa investasi infrastruktur belum mampu memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan PAD pada sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Adriani (2019), yang menyimpulkan bahwa dampak fiskal positif dari infrastruktur baru terasa dalam jangka menengah dan panjang, bukan secara instan. Selain itu, ketergantungan terhadap pembiayaan infrastruktur dari dana transfer pusat juga membuat dampaknya terhadap kemandirian fiskal menjadi terbatas.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Tanah Laut pada periode 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa:

Efisiensi Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan secara marginal terhadap kemandirian fiskal daerah pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya efisiensi anggaran yang dilakukan selama ini lebih cenderung berupa penghematan belanja tanpa diikuti peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD).

Investasi Infrastruktur juga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Peningkatan belanja modal infrastruktur belum berdampak positif pada peningkatan kemandirian fiskal, kemungkinan karena investasi tersebut belum bersifat produktif atau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

## Referensi

- Adriani, D. (2019). Peran belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal. *Jurnal Keuangan Daerah*.
- Arifin, M., & Koesrindartoto, D. (2021). Infrastruktur sebagai Pengungkit Kinerja PAD: Studi Strategi Fiskal Daerah. *International Journal of Economics, Finance and Issues*
- Aschauer, D. A. (1989). *Is public expenditure productive? Journal of Monetary Economics*.
- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). *Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. World Development*.
- Handayani, L., & Andriyani, F. (2021). Pengaruh efisiensi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*
- Harjowiryo, L. (2018). Fiskal desentralisasi dan kinerja keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Hidayat, R., & Wulandari, L. (2023). Keterkaitan Investasi Publik dan Produktivitas Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Kebijakan*
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

- Noviyanti, E., & Widodo, T. (2022). Efisiensi Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Pembangunan. *Jurnal Manajemen Keuangan*
- OECD. (2019). *Making decentralisation work: A handbook for policy-makers*. OECD Publishing.
- Putri, A. R., & Widodo, T. (2022). Analisis belanja modal infrastruktur terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Rahmawati, D. (2020). Efektivitas dan efisiensi fiskal daerah dalam perspektif otonomi keuangan. *Jurnal Kebijakan Fiskal*.
- Sidik, M., & Kadjatmiko. (2004). Evaluasi Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Sugiarto, H., & Mulyani, S. (2021). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah dan Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perencanaan Keuangan Daerah*.
- Yuliani, D., & Prasetyo, A. (2021). Ketergantungan Fiskal dan Kapasitas PAD Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*